

## HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

PENGARUH KOMPOSISI KOMISARIS INDEPENDEN DAN KEPEMILIKAN  
TERKONSENTRASI TERHADAP KINERJA BANK YANG TERDAFTAR DI  
BURSA EFEK INDONESIA

**Nama** : Jefri Alfath  
**NIM/BP** : 77739/2006  
**Program Studi** : Akuntansi  
**Keahlian** : Akuntansi Manajemen  
**Fakultas** : Ekonomi

Padang, Januari 2012

Disetujui Oleh:

Pembimbing I

Pembimbing II

Nelvrita, SE, M.Si, Ak  
NIP. 197407061 999032 002

Fefri Indra Arza, SE, M.Si, Ak  
NIP. 19730213 199903 1 003

Mengetahui,  
Ketua Prodi Akuntansi

Fefri Indra Arza, SE, M.Si, Ak  
NIP. 19730213 199903 1 003

## HALAMAN PENGESAHAN LULUS UJIAN SKRIPSI

*Dinyatakan Lulus Setelah Dipertahankan di depan Tim Penguji Skripsi  
Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi  
Universitas Negeri Padang*

PENGARUH KOMPOSISI KOMISARIS INDEPENDEN DAN KEPEMILIKAN  
TERKONSENTRASI TERHADAP KINERJA BANK YANG TERDAFTAR DI  
BURSA EFEK INDONESIA

**Nama** : Jefri Alfath  
**NIM/BP** : 77739/2006  
**Program Studi** : Akuntansi  
**Keahlian** : Akuntansi Manajemen  
**Fakultas** : Ekonomi

Padang, Januari 2012

### Tim Penguji

No	Jabatan	Nama	Tanda Tangan
1.	Ketua	: Nelvirita, SE, M.Si, Ak	_____
2.	Sekretaris	: Fefri Indra Arza, SE, M.Sc, Ak	_____
3.	Anggota	: CharolineC heisviyanny, SE, M.Ak	_____
4.	Anggota	: Nelvirita, SE, M.Si, Ak	_____

**PENGARUH KOMPOSISI KOMISARIS INDEPENDEN DAN  
KEPEMILIKAN TERKONSENTRASI TERHADAP KINERJA BANK  
YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA**

**SKRIPSI**

*Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat untuk mendapatkan gelar  
Sarjana Ekonomi (S1) Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi  
Universitas Negeri Padang*



*Oleh :*

**JEFRI ALFATH**

**2006/77739**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS NEGERI PADANG  
2012**

## ABSTRAK

**Jefri Alfath (77739) : Pengaruh Komposisi Komisaris Independen Dan Kepemilikan Terkonsentrasi Terhadap Kinerja Bank Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia, Skripsi Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang, 2012.**

**Pembimbing : 1. Nelvirita, SE, M.Si, Ak  
2. Fefri Indra Arza, SE, M.Sc, Ak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) Pengaruh komposisi komisaris independen terhadap kinerja bank yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (2) Pengaruh kepemilikan terkonsentrasi terhadap kinerja bank yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

Jenis penelitian ini adalah bersifat kausatif. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dari tahun 2006-2010. Penetapan sampel ditetapkan dengan teknik *purposive sampling*. Data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari IDX (*Indonesia Stock Exchange*), ICMD (*Indonesian Capital Market Directory*). Teknik analisis data dengan menggunakan regresi linear berganda.

Hasil pengujian menunjukkan bahwa: (1) komposisi komisaris independen berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja bank secara umum dan bank besar serta bank kecil yang diukur dengan ROA. (2) Struktur kepemilikan yang terkonsentrasi menyebabkan kinerja yang baik pada bank secara umum dan bank besar. Namun struktur kepemilikan terkonsentrasi pada bank kecil tidak memberikan pengaruh terhadap kinerja.

Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kinerja perusahaan perbankan yang disebabkan oleh faktor-faktor lain yang tidak diamati dalam penelitian ini masih relatif besar. Sehingga peneliti selanjutnya diharapkan menambahkan atau menggunakan variabel-variabel lain yang diduga dapat memberikan model pendugaan kinerja perusahaan yang lebih baik. Bagi perusahaan hendaknya meningkatkan kinerja keuangan perusahaan, agar para investor tertarik untuk berinvestasi pada perusahaan emiten tersebut. Bagi investor, kreditor dan pemegang saham yang tertarik berinvestasi pada perusahaan emiten sebaiknya memperhatikan kinerja keuangan perusahaan emiten, apakah kinerja keuangan perusahaan tersebut bagus atau tidak.

## **KATA PENGANTAR**

Syukur Alhamdulillah penulis ucapkan kehadiran Allah SWT, karena dengan rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul “Pengaruh Komposisi Komisaris Independen dan Kepemilikan Terkonsentrasi Terhadap Kinerja Bank Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia”. Skripsi ini merupakan salah satu syarat memperoleh gelar sarjana ekonomi pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.

Dalam penyelesaian skripsi ini penulis banyak mendapat bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih terutama kepada Ibu Nelvirita, SE, M.Si, Ak sebagai pembimbing I dan Bapak Fefri Indra Arza, SE, M.Sc, Ak sebagai pembimbing II yang telah menyediakan waktu dan tenaga untuk membimbing penulis selama ini. Selain itu, tak lupa penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dekan dan Pembantu Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
2. Ketua dan Sekretaris Program Studi Akuntansi.
3. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
4. Bapak dan Ibu Staf Tata Usaha dan Perpustakaan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang yang telah membantu dalam kelancaran Administrasi dan perolehan buku-buku penunjang skripsi.
5. Papa, mama, kakak, adik dan seluruh keluarga besar penulis atas kasih sayang dan bantuan moril dan materil.

6. Teman-teman di Fakultas Ekonomi yang banyak memberikan saran, bantuan dan dorongan dalam penyusunan skripsi ini, terutama teman-teman Program Studi Akuntansi Angkatan 2006.
7. Dan semua pihak yang telah membantu penyelesaian skripsi ini, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih terdapat kekurangan-kekurangan, penulis mohon maaf. Semoga penelitian berikutnya akan menjadi lebih baik lagi. Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini mempunyai arti dan dapat memberikan manfaat bagi penulis dan pembaca. Amin.

Padang, Januari 2012

Penulis

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	i
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	ii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	iv
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	vii
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	viii
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	ix
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Identifikasi Masalah .....	10
C. Pembatasan Masalah .....	10
D. Rumusan Masalah .....	11
E. Tujuan Penelitian .....	11
F. Manfaat Penelitian .....	11
<b>BAB II. KAJIAN TEORI, KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS</b>	
A. Kajian Teori .....	13
1. Agency Theory.....	13
2. Kinerja Perusahaan.....	16
a. Pengertian Kinerja Perusahaan.....	16
b. Penilaian Kinerja .....	17

3. <i>Corporate Governance</i> .....	20
a. Pengertian <i>Corporate Governance</i> .....	20
b. Prinsip-prinsip <i>Corporate Governance</i> .....	21
c. Tujuan <i>Corporate Governance</i> .....	23
4. Mekanisme Internal <i>Corporate Governance</i> .....	24
a. <i>Board Composition</i> .....	25
b. Komposisi Dewan Komisaris di Indonesia.....	28
c. Struktur Kepemilikan (Kepemilikan Terkonsentrasi) ..	33
B. Penelitian Relevan .....	39
C. Pengembangan Hipotesis .....	40
D. Kerangka Konseptual .....	43
E. Hipotesis.....	45
 <b>BAB III. METODE PENELITIAN</b>	
A. Jenis Penelitian .....	46
B. Populasi Dan Sampel .....	46
C. Jenis dan Sumber Data .....	50
D. Variabel Penelitian .....	51
E. Teknis Analisis Data .....	53
1. Uji Asumsi Klasik.....	53
2. Model dan Teknik Analisis Data .....	57
3. Uji Hipotesis (t-test) .....	59
F. Definisi Operasional .....	60

#### **BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Temuan Umum.....	62
1. Gambaran Umum Bursa Efek Indonesia (BEI) .....	62
2. Gambaran Umum Perbankan di Indonesia .....	63
B. Deskriptif Variabel Penelitian.....	66
1. Analisis Deskriptif .....	66
2. Statistik Deskriptif .....	74
C. Hasil Uji Asumsi Klasik .....	75
D. Teknik Analisis Data.....	79
E. Pengujian Hipotesis.....	82
F. Kesimpulan Hasil Pengujian Hipotesis.....	88
G. Pembahasan.....	89

#### **BAB V. PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	94
B. Keterbatasan Penelitian.....	95
C. Saran.....	95

#### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **LAMPIRAN**

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel</b>	<b>Halaman</b>
1. Daftar Sampel .....	48
2. Keterangan Penolakan Sampel.....	49
3. Data Perkembangan Kinerja Perusahaan Perbankan .....	67
4. Data Komposisi Komisaris Independen Perusahaan Perbankan .....	68
5. Data Perkembangan Kepemilikan Trkonsentrasi Perusahaan Perbankan.	70
6. Data Ukuran Perusahaan Perbankan Yang Tergolong Kepada Bank Besar	72
7. Data Ukuran Perusahaan Perbankan Yang Tergolong Kepada Bank Kecil	73
8. Statistik Deskriptif .....	74
9. Uji Normalitas.....	76
10. Uji Multikolinearitas .....	77
11. Uji Heterokedastisitas .....	77
12. Uji Autokorelasi.....	78
13. Uji F Statistik .....	79
14. <i>Adjusted R Square</i> .....	80
15. Koefisien Regresi Berganda.....	81
16. Uji F Statistik Bank Besar.....	83
17. <i>Adjusted R Square</i> Bank Besar .....	83
18. Koefisien Regresi Berganda Bank Besar .....	84
19. Uji F Statistik Bank Kecil .....	85
20. <i>Adjusted R Square</i> Bank Kecil.....	86

## DAFTAR GAMBAR

<b>Gambar</b>	<b>Halaman</b>
Kerangka Konseptual .....	44

## DAFTAR LAMPIRAN

1. Perhitungan Kinerja Perusahaan Sampel .....	102
2. Perhitungan Komposisi Komisaris Independen .....	105
3. Struktur Kepemilikan Perusahaan.....	108
4. Pengkategorian Ukuran Perusahaan Sampel.....	118
5. Uji Asumsi Klasik Tanpa Variabel Kontrol .....	121
6. Analisis Regresi Berganda Tanpa Variabel Kontrol.....	123
7. Uji Asumsi Klasik Untuk Bank Besar .....	125
8. Analisis Regresi Berganda Untuk Bank Besar.....	127
9. Uji Asumsi Klasik Untuk Bank Kecil.....	129
10. Analisis Regresi Berganda Untuk Bank Kecil.....	131

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Penilaian kinerja perusahaan saat ini merupakan hal yang sangat penting untuk memenangkan persaingan global, karena kinerja perusahaan tersebut menunjukkan hasil kerja atau prestasi perusahaan pada suatu periode. Kinerja perusahaan ini akan mencerminkan bagaimana penerapan strategi perusahaan dalam rangka pencapaian tujuan.

Kinerja pada dasarnya merupakan sesuatu yang dihasilkan atau hasil kerja yang dicapai dari suatu usaha (Purwadarminta, 2007 dalam Zarkasyi, 2008). Kinerja perusahaan dapat dinilai dan dilihat dengan menganalisis laporan keuangan perusahaan. Laporan keuangan perusahaan menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan perusahaan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomi (IAI, 2009). Oleh karena itu, laporan keuangan harus menyediakan informasi yang relevan bagi para pemakainya, netral dari keinginan pihak-pihak tertentu yang ingin mengambil keuntungan pribadi dari informasi yang disajikan di dalam laporan itu dan harus menyajikan informasi yang komprehensif dan lengkap (Sulistiyanto, 2008:31).

Akan tetapi pada kenyataannya, informasi di dalam laporan keuangan seringkali diselewengkan oleh manajemen sehingga laporan keuangan tersebut tidak bisa melaporkan kinerja perusahaan yang sesungguhnya terjadi pada suatu

periode akuntansi sehingga menyebabkan para *stakeholder* bisa mengambil keputusan yang salah. Hal ini didukung oleh maraknya kasus pembobolan dana nasabah yang menimpa industri perbankan dalam negeri belakangan ini, sehingga menimbulkan kekhawatiran kepada nasabah dan *stakeholder* lainnya.

Di Indonesia paling tidak ada sembilan kasus pembobolan bank yang terjadi pada awal tahun 2011, yakni Bank Rakyat Indonesia (BRI) sebesar Rp29 miliar, Bank Internasional Indonesia (BII) senilai Rp3,6 miliar, Bank Mandiri senilai Rp18 miliar dan Bank Negara Indonesia (BNI). Lalu, Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Pundi Artha Sejahtera, Bank Danamon senilai Rp1,9 miliar dan US\$110 ribu, Panin Bank dengan nilai kerugian Rp2,5 miliar, Citibank senilai Rp17 miliar dan terakhir Bank Mega senilai Rp111 miliar. Kasus-kasus itu membuat publik mempertanyakan keamanan sistem perbankan nasional pada umumnya, dan sistem internal bank pada khususnya, (Munjin, April 2011 melalui [www.google.co.id](http://www.google.co.id)).

Sejauh ini kejahatan perbankan bisa disebabkan baik oleh faktor eksternal maupun internal, atau bisa merupakan gabungan dari keduanya. Namun, bisa juga disebabkan lemahnya fungsi pengawasan internal. Kendati faktor eksternal relatif tidak terlalu sering, bisa berdampak besar secara finansial. Yang paling sulit dan berbahaya adalah fraud yang dilakukan oknum internal bank yang menguasai atau memahami sistem operasional bank.

Oknum bank yang menyalahgunakan kewenangan lantaran terdorong moral hazard bisa menyebabkan kerugian bagi bank ataupun nasabahnya dan stakeholder lainnya. Internal fraud yang menimpa bank-bank cukup menjadi bukti

masih lemahnya sistem pengawasan internal. Kelengahan itu dimanfaatkan oknum orang dalam yang mengetahui detail kelemahan-kelemahan sistem operasional bank. Kejahatan perbankan mudah dipicu tiga faktor sistem perbankan yang tidak berjalan baik, yakni teknologi informasi, SDM, serta sistem dan prosedur (Seputar Indonesia, April 2011). Dengan kata lain, menjadi bukti yang menggambarkan bahwa masih lemahnya *corporate governance* industri perbankan di Indonesia yang secara langsung dapat berakibat buruk terhadap kinerja perusahaan.

Kinerja perusahaan hendaknya merupakan hasil yang dapat diukur dan menggambarkan kondisi empirik suatu perusahaan dari ukuran yang disepakati. Guna mengetahui tingkat kinerja suatu perusahaan dilakukan serangkaian tindakan evaluasi yang pada intinya adalah penilaian atas hasil usaha yang dilakukan selama periode waktu tertentu (Zarkasyi, 2008:48). Penilaian kinerja perusahaan dapat dilakukan melalui pengukuran kinerja perusahaan dimana pengukuran kinerja perusahaan ini dapat dilihat dari ukuran berdasarkan akuntansi, ukuran berdasarkan pasar, ukuran hibrid (Grob, 2007:24).

Pengukuran kinerja perusahaan berdasarkan ukuran akuntansi terdiri dari ROA (*Return On Assets*) dan ROE (*Return On Equity*). ROE hanya mengukur pengembalian aset pemilik ekuitas, sedangkan ROA mengukur pengembalian *equityholders* dan *debtholders*. Untuk pengukuran kinerja perusahaan berdasarkan pasar terdiri dari *Cumulated Abnormal Return* (CAR) dan *market returns* (MR) yang digunakan pada *event studies*, sedangkan ukuran hibrid terdiri dari *market to book ratio* dan Tobin'Q (Grob, 2007:24).

Penelitian ini menggunakan pengukuran kinerja dengan ukuran akuntansi karena ukuran ini bisa diterapkan untuk semua ukuran perusahaan, baik itu perusahaan privat, kecil, maupun perusahaan yang telah *listing*. McNaughton dan Barltrop (1992) dalam Tressa (2007) berpendapat bahwa ROA lebih bernilai ketika membandingkan kinerja antara bank-bank yang berbeda yang beroperasi dalam pasar yang sama. Berdasarkan penjelasan di atas, maka pada penelitian ini kinerja perusahaan lebih tepat apabila menggunakan ukuran berdasarkan akuntansi yaitu ROA.

Bertolak pada sebuah penelitian yang dilakukan oleh *Asian Development Bank* (ADB, 2000) melaporkan bahwa krisis ekonomi yang melanda kawasan Asia dan Amerika Latin tahun 1998 lalu, disebabkan oleh kegagalan dalam pelaksanaan *corporate governance*. Dalam hal ini Indonesia, sebagai salah satu negara yang paling terkena dampak krisis, berusaha untuk melakukan reformasi sistem keuangan dan reformasi terhadap aturan bagi perusahaan dan mekanisme untuk mencapai *Good Corporate Governance* (Patrick 2001). Jika *Good Corporate Governance* (GCG) diterapkan secara substansial dan mematuhi aturan, maka *corporate governance* secara langsung dapat berpengaruh terhadap kinerja perusahaan.

*Corporate governance* merupakan tata kelola perusahaan yang menjelaskan hubungan antara berbagai partisipan dalam perusahaan yang menentukan arah dan kinerja perusahaan (Monks dan Minnow, 2003 dalam Tressa, 2007). Pandangan dominan *corporate governance* terletak pada persoalan pemisahan kepemilikan dan kontrol dalam perusahaan, yang mana dimodelkan

dalam teori keagenan. Teori keagenan (*Agency theory*) merupakan suatu perspektif yang dengan jelas menggambarkan potensi konflik yang timbul akibat adanya pemisahan antara fungsi kepemilikan (*ownership*) dan fungsi pengendalian (*control*) yang dikenal sebagai *agency problem*, sebagaimana dikemukakan oleh Jensen dan Meckling (1976). Masalah muncul ketika *agent* memiliki kepentingan yang berbeda dengan *principal*. Untuk menghindari masalah tersebut suatu perusahaan harus menerapkan konsep kontrol yang lebih lanjut sebagai pengembangan mekanisme kontrol perusahaan yang baik.

Sebagai sebuah sistem, *corporate governance* terdiri dari berbagai sub-sistem yang saling terintegrasi dalam upaya peningkatan kinerja perusahaan, dalam suatu bentuk struktur dan mekanisme *governance*, baik dari sisi eksternal maupun dari sisi internal perusahaan. Menurut format World Bank (2000) dalam Puspita (2006) faktor eksternal terdiri dari semua pihak yang memiliki kepentingan dengan perusahaan (*stakeholders*), lingkungan usaha, serta peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di tempat operasional perusahaan, termasuk di dalamnya standar-standar akuntansi. Sementara faktor internal terdiri dari struktur *governance* yang menggambarkan berbagai elemen di dalam perusahaan (Lukviarman, 2004). Menurut Middlemist (2004), mekanisme internal *governance* meliputi konsentrasi kepemilikan (*ownership concentration*), peran *monitoring* dewan komisaris (ukuran dan komposisi) dan *executive compensation*. Di antara elemen internal yang memiliki peranan yang sangat penting dalam struktur *governance* perusahaan adalah dewan komisaris perusahaan dan konsentrasi kepemilikan. Hal ini disebabkan karena fungsi pengawasan dan

kontrol yang dimiliki oleh dewan komisaris dan konsentrasi kepemilikan terhadap kinerja manajemen. Sehingga menutup kemungkinan terjadinya masalah kepentingan yang kerap terjadi antara manajer (*agent*) dan pemilik saham (*principal*)

Inti dari mekanisme internal *governance* terletak pada peran disiplin dewan komisaris. Dewan komisaris memegang peranan yang sangat penting dalam perusahaan terutama dalam pelaksanaan *corporate governance*. Dewan Komisaris bertanggung jawab untuk mengawasi kinerja dan kebijakan yang dibuat oleh manajemen/dewan direksi dan memberikan nasihat kepada manajemen.

Menurut Farma dan Jensen (1983), efektivitas pemantauan dewan komisaris meningkat karena komisaris independen memiliki insentif untuk melaksanakan tugas dan tidak berkolusi dengan manajer dalam pengendalian keputusan. Komisaris independen merupakan pihak yang bertanggung jawab untuk mendorong diterapkannya prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) untuk menjamin transparansi dan keterbukaan laporan keuangan, keadilan untuk semua stakeholders, dan pengungkapan semua informasi meski ada konflik kepentingan (Sulistyanto, 2008).

Selain itu, Brennan dan McDermott (2004) berpendapat bahwa perbaikan independensi dewan komisaris perusahaan akan berdampak pula pada perbaikan kinerja perusahaan. Dengan kata lain komisaris independen berpengaruh terhadap kinerja perusahaan.

Selain dewan komisaris, kepemilikan terkonsentrasi (*concentrated ownership*) juga diakui sebagai mekanisme pengendali dalam perusahaan. Menurut Nuryaman (2008), kepemilikan terkonsentrasi adalah suatu kondisi dimana sebagian besar saham dimiliki oleh sebagian kecil individu/kelompok, sehingga individu atau kelompok tersebut memiliki jumlah saham relatif dominan dibandingkan dengan pemegang saham lainnya.

Konsentrasi kepemilikan merupakan salah satu karakteristik dari struktur kepemilikan dimana konsentrasi kepemilikan ini memberikan informasi kuantitatif dari jumlah saham yang dimiliki oleh para pemegang saham. Struktur kepemilikan dapat dijelaskan dari dua sudut pandang, yaitu pendekatan keagenan dan pendekatan informasi asimetri. Menurut pendekatan keagenan, struktur kepemilikan merupakan suatu mekanisme untuk mengurangi konflik kepentingan antara manajer dengan pemegang saham. Pendekatan ketidakseimbangan informasi memandang mekanisme struktur kepemilikan sebagai suatu cara untuk mengurangi ketidakseimbangan informasi antara *insiders* dan *outsiders* melalui pengungkapan informasi di dalam pasar modal.

Kepemilikan saham yang semakin terkonsentrasi dapat berperan sebagai mekanisme tata kelola perusahaan dalam mengurangi persoalan keagenan, sebab konsentrasi kepemilikan dapat menjadikan pemegang saham pada posisi yang kuat untuk dapat mengendalikan manajemen secara efektif, sehingga mendorong manajemen bertindak sesuai dengan kepentingan pemegang saham yang menginginkan peningkatan kinerja perusahaan (Musnadi, 2006 dalam Nuryaman, 2008). Perusahaan dikatakan memiliki struktur kepemilikan terkonsentrasi jika

jumlah saham pengendalinya diatas 50% dan dikatakan memiliki struktur kepemilikan menyebar jika jumlah saham pengendali dibawah 50%.

Kepemilikan terkonsentrasi tidak hanya akan memiliki kekuatan untuk memantau manajer tetapi juga memiliki kemampuan dalam menyelaraskan kepentingan manajemen dan pemegang saham, yang berakibat pada kinerja yang lebih baik (Rahman & Haniffa 2003).

Beberapa penelitian terdahulu telah dilakukan oleh para peneliti lain diantaranya penelitian tentang proporsi dewan komisaris independen telah dilakukan oleh Tressa (2007) hasil penelitiannya menunjukkan adanya pengaruh signifikan positif antara proporsi *outside directors* (komisaris independen) dengan kinerja bank yang listed di JSX.

Penelitian tentang kepemilikan terkonsentrasi dilakukan oleh Desiva (2010) hasil penelitiannya menunjukkan bahwa struktur kepemilikan berpengaruh signifikan terhadap kinerja perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Artinya, bahwa semakin besar persentase kepemilikan saham oleh satu pihak dominan (kepemilikan terkonsentrasi) maka semakin tinggi kinerja perusahaan.

Penelitian ini menggunakan ukuran perusahaan sebagai variabel kontrol. Variabel kontrol merupakan variabel yang faktornya dikontrol untuk menetralkan pengaruhnya yang dapat mengganggu hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen. Dalam hal ini Ukuran perusahaan dibagi atas dua sub kategori yakni bank besar dan bank kecil. Pengujian dilakukan untuk menguji dan membandingkan apakah hubungan antara komposisi komisaris independen dan

kepemilikan terkonsentrasi terhadap kinerja perusahaan adalah sama untuk semua bank dan pada sub-kategori ukuran perusahaan yakni bank besar dan bank kecil. Gosh (1998), berpendapat bahwa ukuran perusahaan diharapkan memiliki hubungan yang positif terhadap kinerja karena rata-rata perusahaan besar lebih menguntungkan dari perusahaan-perusahaan kecil karena mereka mampu membagi (mendiversifikasi) resiko.

Penelitian ini akan mengambil populasi dan sampel dari perusahaan perbankan. Alasan penulis mengambil perusahaan perbankan sebagai sampel penelitian karena terdapat masalah yang terjadi pada beberapa perusahaan perbankan dalam negeri yang terbukti telah gagal dalam menjalankan dan mengawasi sistem internal bank sehingga dapat merugikan para pemegang saham. Sebagaimana dinyatakan Eliyanora (2008), perbankan di suatu negara sangat vital, dimana apabila sistem perbankan ini tidak berfungsi maka bukan industri perbankan itu saja yang *collapse* tetapi juga akan memberikan *multiplier effect* yang sangat negatif terhadap kinerja sistem-sistem ekonomi yang lain, misalnya pertumbuhan sektor riil, tingkat pengangguran yang tinggi, dan rendahnya pertumbuhan ekonomi. *Good corporate governance* pada industri perbankan menjadi lebih penting untuk saat ini dan masa-masa yang akan datang, mengingat resiko dan tantangan yang dihadapi oleh industri perbankan semakin meningkat (Penjelasan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum).

Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk mengambil penelitian tentang komposisi komisaris independen dan kepemilikan terkonsentrasi dan dampaknya terhadap kinerja bank di Indonesia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI).

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, penulis mengidentifikasi masalah-masalah yang akan menjadi pokok pembahasan secara lebih spesifik dalam rumusan masalah sebagai berikut :

1. Sejauhmana pengaruh antara komposisi komisaris independen terhadap kinerja pada bank yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia ?
2. Sejauhmana pengaruh antara kepemilikan terkonsentrasi terhadap kinerja pada bank yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia ?
3. Sejauhmana pengaruh kompensasi eksekutif terhadap kinerja pada bank yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia ?

## **C. Pembatasan Masalah**

Dalam penelitian ini penulis memberikan batasan masalah agar penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang sesuai dengan yang diharapkan dan permasalahan yang akan dibahas bisa terpecahkan dengan lebih terarah pada tujuannya, maka batasan masalah dalam penelitian ini hanya pada masalah pengaruh komposisi komisaris independen dan kepemilikan terkonsentrasi terhadap kinerja bank yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

#### **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah dikemukakan, maka dapat dirumuskan hal-hal pokok yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini. Hal-hal tersebut antara lain yang dapat ditanyakan sebagai berikut :

1. Sejauhmana pengaruh komposisi komisaris independen terhadap kinerja pada bank yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia ?
2. Sejauhmana pengaruh kepemilikan terkonsentrasi terhadap kinerja pada bank yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia ?

#### **E. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui apakah ada pengaruh dari komposisi komisaris independen terhadap kinerja pada bank yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
2. Untuk mengetahui apakah ada pengaruh dari kepemilikan terkonsentrasi terhadap kinerja pada bank yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

#### **F. Manfaat Penelitian**

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan banyak manfaat yang diantaranya adalah:

1. Bagi penulis, adalah untuk menambah wawasan mengenai pengaruh komposisi komisaris independen dan kepemilikan terkonsentrasi terhadap

kinerja pada sektor perbankan, juga sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi.

2. Bagi perusahaan, hasil penelitian ini dapat menjadi bahan masukan atau sebagai pedoman bagi perusahaan untuk mengetahui aspek-aspek yang mempengaruhi peningkatan kinerja perusahaan.
3. Bagi dunia akademik, penelitian ini diharapkan dapat menambah bukti empiris dari penelitian-penelitian sebelumnya mengenai praktik *corporate governance* berkaitan dengan kinerja.

## BAB II

### KAJIAN TEORI, KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS

#### A. Kajian Teori

##### 1. *Agency Theory*

Teori keagenan (*Agency theory*) telah menjadi perspektif teoritis yang populer dalam *corporate governance* untuk menjelaskan perilaku organisasi. Secara umum, teori keagenan digunakan untuk menganalisis hubungan antara prinsipal dan agen. Hal ini berkaitan dengan perancangan langkah-langkah struktural dan perilaku yang dapat meminimalisir inefisiensi dalam struktur kontraktual perusahaan. Kontrak tersebut menggambarkan atau menentukan hubungan keagenan: antara pemegang saham (*principal*) dan manajer (*agent*), antara debitor (*principal*) dan manajer (*agent*), antara pemegang saham (*principal*) dan direksi perusahaan (*agent*) dan antara direksi perusahaan (*principal*) dan berbagai dewan komite (*agent*).

*Agency relationship* didefinisikan sebagai kontrak dimana satu atau lebih orang (disebut owners atau pemegang saham atau pemilik) menunjuk seorang lainnya (disebut agen atau pengurus atau manajemen) untuk melakukan beberapa pekerjaan atas nama pemilik. *Agency theory*, sebagaimana telah dikemukakan oleh Jensen dan Meckling (1976) didasarkan pada masalah pemisahan antara kontrol dan kepemilikan. Pemisahan tersebut akan memberikan dorongan pada *agent* (manajer perusahaan) untuk melakukan aktivitas yang akan memberi keuntungan bagi pribadinya, dengan mengorbankan kepentingan *principal*

(penyedia dana). Dasar pemikirannya yaitu bahwa “jika kedua pihak memaksimalkan perannya” (*utility maximizers*), cukup beralasan apabila manajemen tidak akan selalu bertindak untuk kepentingan pemilik. Jensen dan Meckling meyakini bahwa perbedaan kepentingan antara pemilik dan manajemen menyebabkan manajemen (*agent*) gagal dalam memaksimalkan kesejahteraan pemilik (*principal*). Kegagalan tersebut adalah biaya yang paling penting yang ditimbulkan oleh konflik antara *principal* dan *agent* yang dikenal dengan *agency problem*.

Sebagai pengelola perusahaan, manajer perusahaan tentu akan lebih banyak mengetahui informasi internal dan prospek perusahaan di masa yang akan datang dibandingkan pemilik (pemegang saham). Oleh karena itu manajer sudah seharusnya selalu memberikan sinyal mengenai kondisi perusahaan kepada pemilik. Sinyal yang dapat diberikan oleh manajer yakni melalui pengungkapan informasi akuntansi seperti laporan keuangan. Laporan keuangan merupakan hal yang sangat penting bagi para pengguna eksternal terutama sekali karena kelompok ini berada dalam kondisi yang paling besar ketidakpastiannya (Ali, 2002).

Perusahaan perbankan menghadapi *agency problem* yang lebih spesifik (Hasan dkk, 2004 dalam Tressa, 2007). Karena bank pada dasarnya berfungsi sebagai perantara antara kontrak deposito dan kontrak pinjaman, sehingga tergabung konflik kepentingan antara bank dan peminjam. Oleh karena itu, jenis kontrak keuangan tersebut membentuk dasar untuk *agency relationship* antara pemegang hutang (kreditur) dan pemegang proyek (peminjam). Dalam tipe

*agency relationship* ini, permasalahan informasi yang asimetris (*asymmetric information*) menjadi benar-benar penting. Asimetri informasi merupakan suatu kondisi di mana ada ketidakseimbangan perolehan informasi antara pihak manajemen sebagai penyedia informasi dengan pihak pemegang saham dan *stakeholder* pada umumnya sebagai pengguna informasi (Arief, 2008).

*Corporate finance theory* menekankan masalah *asymmetric information*, dimana peminjam dianggap lebih mengetahui situasi bisnisnya dari pada calon pemberi pinjaman. Di antara banyak industri, sistem perbankan merupakan contoh klasik dari masalah *asymmetric information* (Keat & Young, 2003). *Asymmetric information* mengakibatkan permasalahan *adverse selection* dan *moral hazard*, dimana *adverse selection* muncul ketika agen memiliki informasi yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan sementara principal (bank) tidak mengetahuinya dan *moral hazard* muncul karena saat pinjaman telah disetujui, peminjam dapat memilih untuk mengubah sikapnya (agent tidak melakukan usaha sebagaimana yang telah disepakati bersama dalam kontrak kerja sehingga merugikan kepentingan kreditor). *The Agency theory* menyebutkan bahwa potensi konflik tersebut secara inheren mengurangi nilai perusahaan sebagai entitas ekonomi. Dengan demikian, kebutuhan akan mekanisme *corporate governance* yang efektif dalam memantau tindakan peminjam (debitur) sehingga sesuai dengan kepentingan bank (kreditor) menjadi suatu keharusan.

## 2. Kinerja Perusahaan

### 1) Pengertian Kinerja Perusahaan

Kinerja pada dasarnya merupakan sesuatu yang dihasilkan atau hasil kerja yang dicapai dari suatu usaha (Purwadarminta, 2007 dalam Zarkasyi, 2008). Pratolo (2007) menjelaskan *Performance* atau kinerja merupakan suatu pola tindakan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan yang diukur dengan mendasarkan pada suatu perbandingan dengan berbagai standar. Kinerja adalah pencapaian suatu tujuan dari suatu kegiatan atau pekerjaan tertentu untuk mencapai tujuan perusahaan yang diukur dengan standar.

Kinerja perusahaan merupakan suatu pengukuran prestasi perusahaan yang ditimbulkan sebagai akibat dari proses pengambilan keputusan manajemen yang kompleks dan sulit, karena menyangkut efektivitas pemanfaatan modal, efisiensi, dan rentabilitas dari kegiatan perusahaan (Mariewaty dan Setyani, 2005). Seluruh kinerja perusahaan ini hendaknya dievaluasi setiap periode waktu tertentu, misalnya setiap bulan, atau periode lain yang lebih pendek waktunya seperti setiap minggu atau periode yang lebih lama seperti setiap kuartal (Umar, 2003:11).

Kinerja perusahaan dapat dinilai dan diukur oleh *stakeholders* dari laporan keuangan perusahaan. IAI (1998) dalam PSAK (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan) No.1 menyatakan bahwa:

Laporan keuangan harus menyajikan secara wajar posisi keuangan, kinerja keuangan, perubahan ekuitas, dan arus kas perusahaan dengan menerapkan PSAK secara benar disertai pengungkapan yang diharuskan PSAK dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

## **2) Penilaian Kinerja**

Mulyadi (1997:419) menyatakan penilaian kinerja adalah penentuan secara periodik efektivitas operasional suatu organisasi, bagian organisasi, dan karyawannya berdasarkan sasaran, standar, dan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya. Karena organisasi pada dasarnya dijalankan oleh manusia, maka penilaian kinerja sesungguhnya merupakan penilaian atas perilaku manusia dalam melaksanakan peran yang mereka mainkan dalam organisasi.

Tujuan pokok penilaian kinerja ini adalah untuk memotivasi karyawan dalam mencapai sasaran organisasi dan dalam mematuhi standar perilaku yang telah ditetapkan sebelumnya, agar membuahkan tindakan dan hasil yang diinginkan. Standar perilaku dapat berupa kebijakan manajemen atau rencana formal yang dituangkan dalam anggaran.

Secara garis besar, penilaian kinerja suatu perusahaan dapat digunakan sebagai alat untuk melakukan analisis yang tergantung dari sudut pandang pemilik, kreditur, dan manajer. Apabila analisis dilakukan dari sudut pandang pemilik, maka kinerja perusahaan dinilai dari segi kemampuan laba perusahaan untuk menghasilkan laba bagi pemegang saham. Jika analisis dilakukan dari sudut pandang kreditur maka kinerja perusahaan dipandang dari segi efisiensi dan efektivitas perusahaan (Kuncoro, 2005 dalam Ariesta, 2009).

Kinerja perusahaan dapat dinilai dengan menganalisis laporan keuangan.

IAI (2009) menyatakan bahwa:

Kinerja perusahaan dapat diukur dengan menganalisis dan mengevaluasi laporan keuangan. Informasi posisi keuangan dan kinerja keuangan seringkali digunakan sebagai dasar untuk

memprediksi posisi keuangan dan kinerja di masa depan dan hal-hal lain yang langsung menarik perhatian pemakai laporan keuangan seperti pembayaran dividen, upah, pergerakan harga sekuritas dan kemampuan perusahaan untuk memenuhi komitmennya ketika jatuh tempo.

Penilaian terhadap kinerja perusahaan ini dapat dilakukan dengan pengukuran kinerja perusahaan. Salah satu pos laporan keuangan yang dapat dijadikan sebagai pengukur kinerja adalah laba. Laba ini dapat dijadikan sebagai pengukur efisiensi dan efektivitas dari kinerja perusahaan. Menurut Suwardjono (2005:459), dalam akuntansi laba dimaknai dan diinterpretasi sebagai pengukur efisiensi oleh investor dalam bentuk kembalian atas investasi (*return on investment/ROI*). Bagi manajemen efisiensi dapat diinterpretasikan sebagai pengukur efisiensi penggunaan sumber daya dalam bentuk kembalian atas asset (*return on assets/ROA*). Bagi kreditor, efisiensi dapat ditunjukkan dengan tingkat bunga (*return on loan/ROL*).

Menurut Grob (2007:24), pengukuran kinerja perusahaan (kinerja keuangan) dapat didasarkan pada tiga ukuran, yaitu:

- 1) Berdasarkan ukuran pasar (*market-based measure*), terdiri dari *cumulated abnormal return* (CAR) dan *market returns* (MR). CAR ini mengukur pengembalian pasar abnormal yang dihubungkan dengan kejadian tertentu sedangkan MR mengukur pertumbuhan nilai saham di atas periode spesifik yang mengira bahwa dividen di investasikan kembali. Ukuran kinerja seperti ini digunakan pada penelitian kejadian (*event studies*).
- 2) Berdasarkan ukuran akuntansi (*accounting-based measure*), terdiri dari ROE (*Return on Equity*) dan ROA (*Return on Assets*). Keuntungan dari pemakaian

ukuran kinerja berdasarkan ukuran akuntansi adalah bahwa ukuran ini bisa diterapkan untuk semua ukuran perusahaan, baik itu perusahaan privat, kecil, maupun perusahaan yang telah *listing*. Selain itu, ukuran ini juga mudah untuk diterapkan. ROE hanya mengukur pengembalian aset dari pemilik ekuitas, sedangkan ROA mengukur pengembalian *equityholders* dan *debtholders*. Jadi, ROA merupakan pengukuran kemampuan perusahaan secara keseluruhan dalam menghasilkan keuntungan dengan jumlah keseluruhan aktiva yang ada di dalam perusahaan dan ROA ini lebih menunjukkan kinerja perusahaan sekarang (Lukman, 2004:63). ROA dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{ROA} = \frac{\text{Laba bersih sesudah pajak}}{\text{Total aktiva}}$$

- 3) Ukuran hibrid (*hybrid measure*), terdiri dari *market to book ratio* (M/B) dan *Tobin's Q*. M/B didefinisikan sebagai nilai pasar dari kewajiban perusahaan dibagi dengan nilai akuntansi dari kewajiban tersebut. Ada dua cara untuk mengkalkulasikan M/B, yaitu: (a) harga pasar saham dibagi dengan ekuitas pemilik (*market-to-equity*) dan (b) harga pasar saham dan hutang dibagi dengan total aktiva (*market-to-assets*). Sedangkan Tobin'Q bukan merupakan pengukur langsung kinerja perusahaan, tetapi hanya sebagai proksi. Ini bisa menyebabkan kesalahan proksi dalam variabel yang menghasilkan tingkat signifikansi yang lebih rendah jika digunakan sebagai variabel endogen dan variabel yang tidak konsisten jika digunakan sebagai variabel penjelas.

### 3. *Corporate Governance*

#### 1) *Pengertian Corporate Governance*

*Corporate governance* telah menjadi kebijakan kunci dalam menyikapi cara perusahaan dikelola di berbagai negara. Pada dasarnya, *corporate governance* merupakan permasalahan dalam organisasi di mana sumber daya organisasi yang didistribusikan antara pihak-pihak terkait dengan organisasi.

*Forum for Corporate Governance in Indonesia* (FCGI) dalam Alijoyo (2003) mendefinisikan *corporate governance* sebagai:

Seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang, pengurus (pengelola) perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan, serta para pemegang kepentingan internal dan eksternal lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka atau dengan kata lain suatu sistem yang mengendalikan perusahaan.

Hal senada dikemukakan oleh Calbury Committe (2003) dalam Zarkasyi (2008) mendefinisikan *corporate governance* sebagai:

Seperangkat aturan yang merumuskan hubungan antara para pemegang saham, manajer, kreditor, pemerintah, karyawan, dan pihak-pihak yang berkepentingan lainnya baik internal maupun eksternal sehubungan dengan hak-hak dan tanggung jawab mereka.

Organization for Economic Cooperation and Development (OECD, 2003) dalam Zarkasyi (2008) mendefinisikan tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*) adalah

Struktur yang stakeholder, pemegang saham, komisaris dan manajer menyusun tujuan perusahaan dan sarana untuk mencapai tujuan tersebut dan mengawasi kinerja.

Monks dan Minnow (1999) dalam Tressa (2007) mendefinisikan *corporate governance* sebagai hubungan antara partisipan dalam menentukan arah dan

kinerja perusahaan. Dengan kata lain, *corporate governance* merupakan mekanisme dalam pengambilan keputusan (Lazonic & Sullivan 2000).

Berdasarkan definisi-definisi di atas dapat disimpulkan bahwa *corporate governance* pada intinya adalah mengenai suatu sistem, proses, dan seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara berbagai pihak yang berkepentingan (stakeholders) terutama dalam arti sempit hubungan antara pemegang saham, dewan komisaris, dan dewan direksi demi tercapainya tujuan organisasi.

## **2) Prinsip-prinsip *Good Corporate Governance***

Dalam kaitan tumbuhnya kesadaran akan pentingnya *corporate governance*, *Organisation For Economic Co-Operation and Development* (OECD) telah mengembangkan prinsip *good corporate governance* dan dapat diterapkan secara luwes sesuai dengan keadaan, budaya dan tradisi masing-masing Negara (Sedarmayanti, 2007), yaitu sebagai berikut:

### **1. *Fairness* (kewajaran)**

Perlakuan yang sama terhadap pemegang saham, terutama kepada saham minoritas dan pemegang saham asing, dengan keterbukaan informasi penting serta melarang pembagian untuk pihak sendiri dan perdagangan saham oleh orang dalam.

### **2. *Disclosure dan transparency* (transparansi)**

Hak pemegang saham, yang harus diberi informasi benar dan tepat waktu mengenai perusahaan, dapat berperan serta dalam pengambilan keputusan mengenai perubahan mendasar atas perusahaan dan

memperoleh bagian keuntungan perusahaan. Pengungkapan yang akurat dan tepat waktu serta transparansi mengenai semua hal penting bagi kinerja perusahaan, kepemilikan serta pemegang kepentingan.

3. *Accountability* (akuntabilitas)

Tanggung jawab manajemen melalui pengawasan efektif melalui keseimbangan kekuasaan antara manajer, pemegang saham, dewan komisaris, dan auditor, merupakan bentuk pertanggungjawaban manajemen kepada perusahaan dan pemegang saham.

4. *Responsibility* (responsibilitas)

Peran pemegang saham harus diakui sebagaimana ditetapkan oleh hukum dan kerja sama yang aktif antara perusahaan serta pemegang kepentingan dalam menciptakan kekayaan, lapangan kerja, dan perusahaan yang sehat dari aspek keuangan.

Prinsip *good corporate governance* menurut OECD mencakup lima bidang utama yaitu:

1. Hak pemegang saham dan perlindungannya.
2. Peran karyawan dan pihak berkepentingan lainnya.
3. Pengungkapan yang akurat dan tepat waktu serta transparansi sehubungan dengan struktur dan operasi korporasi.
4. Tanggungjawab dewan (dewan komisaris maupun direksi) terhadap perusahaan.
5. Pemegang saham dan pihak berkepentingan lainnya.

### **3) Tujuan *Corporate Governance***

*Corporate Governance* mempunyai lima macam tujuan utama (Siswanto dan Alridge, 2005) kelima tujuan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Melindungi hak dan kepentingan pemegang saham.
2. Melindungi hak dan kepentingan para anggota *stakeholders* non pemegang saham.
3. Meningkatkan nilai perusahaan dan para pemegang saham.
4. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja Dewan Pengurus dan manajemen perusahaan.
5. Meningkatkan mutu hubungan Dewan Direksi dengan manajemen senior perusahaan.

Dari perspektif industri perbankan (Basel Commite on Banking Supervision 2005), *corporate governance* melibatkan cara di mana bisnis dan kepentingan masing-masing industri diatur oleh dewan direksi dan manajemen senior, yang mana mempengaruhi bank dengan cara:

- 1) Menetapkan tujuan perusahaan (termasuk menghasilkan keuntungan ekonomi bagi pemilik).
- 2) Menjalankan operasi bisnis sehari-hari.
- 3) Memenuhi kewajiban akuntabilitas kepada para pemegang saham dan memperhatikan kepentingan stakeholder lainnya.
- 4) Memperbaiki aktivitas dan perilaku perusahaan dengan harapan bahwa bank akan beroperasi dengan aman dan sehat, dan sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku, dan

#### 5) Melindungi kepentingan depositor

Terdapat berbagai persoalan terkait konsep *corporate governance*; akuntabilitas dan kinerja (Cadbury 1999), mekanisme untuk mengontrol inefisiensi manajerial atau kegagalan untuk memaksimalkan nilai (Macey 1998), akuntabilitas kepada pemegang saham (Blair 1995), dan mekanisme control yang ditujukan untuk operasi yang efisien dari sebuah korporasi (John & Senbet 1998 dalam Tressa 2007). Sementara, hasil akhir yang diinginkan dari praktik *corporate governance* adalah meningkatnya kinerja perusahaan dan pengurangan konflik kepentingan dalam perusahaan.

#### **4. Mekanisme Internal *Corporate Governance***

Mekanisme merupakan cara kerja sesuatu secara tersistem untuk memenuhi persyaratan tertentu. Mekanisme *corporate governance* merupakan suatu prosedur dan hubungan yang jelas antara pihak yang mengambil keputusan dengan pihak yang melakukan kontrol atau pengawasan terhadap keputusan. Mekanisme *corporate governance*; eksternal dan internal menghadapi permasalahan keagenan (*agency problems*) yang sama antara kreditur dan debitur. Mekanisme eksternal yang biasa dikenal dengan *market for corporate control* bergantung pada efektivitas pasar dalam mendisiplinkan perusahaan dan memberikan sistem peraturan hukum (Lukviarman, 2004) sementara mekanisme internal meliputi konsentrasi kepemilikan (*ownership concentration*), peran *monitoring* dewan komisaris (ukuran dan komposisi) dan *executive compensation* (Middlemist, 2004).

Beda negara menerapkan penekanan yang berbeda pada perangkat pengendalian; internal dan pasar dalam rancangan struktur *corporate control* mereka. Di Amerika Serikat dan Inggris, struktur *governance* lebih bergantung pada pasar sebagai kontrol perusahaan, sementara mekanisme pengendalian internal relatif terabaikan. Di lain pihak, *corporate governance* di Jepang dan Jerman, ditandai dengan penekanan pada penggunaan perangkat kendali internal (*internal control mechanisms*) yang hampir menyeluruh sementara pasar sebagai kontrol perusahaan hampir terabaikan dalam lingkungan usaha mereka (Prowse 1994). Hal ini menunjukkan bahwa mekanisme *governance* yang bekerja dengan baik pada suatu negara belum tentu berlaku sama untuk negara lainnya, disebabkan struktur *governance* dan faktor lingkungan negara yang spesifik. Oleh karena itu, pemilihan mekanisme *corporate governance* yang sesuai untuk suatu negara harus dinilai secara hati-hati untuk memperoleh hasil *governance* yang efektif (Lukviarman, 2004).

Tujuan dari mekanisme control internal adalah untuk memberikan sistem peringatan dini untuk kembali memposisikan organisasi pada jalurnya sebelum kesulitan mencapai tahap krisis (Jensen, 2000). Oleh karena itu, dikatakan bahwa mekanisme internal *corporate governance* terkait dengan kinerja perusahaan.

### **1) *Board Composition***

Posisi dan komposisi *board* berbeda antar satu negara dengan negara lainnya (Moerland 1995). Terdapat dua tipe *Board of Director system* yang digunakan perusahaan-perusahaan di seluruh dunia yaitu *single (one) tier board*

*system* dan *dual (two) tier board system*. Dalam *one-tier board system* perusahaan hanya memiliki satu dewan yaitu *board of directors*. Dimana keanggotaan Dewan Komisaris dan Dewan Direksi tidak dipisahkan. Dalam model ini anggota dewan komisaris juga merangkap anggota dewan direksi dan kedua dewan ini dirujuk sebagai *board of directors*. Model ini mempercayakan fungsi manajemen (*executive director*) dan fungsi kontrol (*non-executive director*) di tangan dewan direksi dan dewan direksi bertanggung jawab kepada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Sistem ini populer di Negara-negara Anglo Saxon, AS, Inggris, Australia dan negara-negara persemakmuran lainnya.

Dalam *two-tier board system*, sebagaimana biasa ditemukan di negara-negara Benua Eropa, *board* terdiri dari dewan direksi dan dewan komisaris. Sistem ini dengan tegas memisahkan keanggotaan Dewan Komisaris sebagai pengawas dan Direksi sebagai eksekutif perusahaan. Dewan direksi merupakan tim manajemen level atas, sedangkan dewan komisaris benar-benar terdiri dari ahli dari luar perusahaan dengan fungsi kontrol yang lebih luas dibandingkan di negara-negara Anglo Saxon (Moerland 1995). Indonesia juga mengadopsi *two-tier system of board* tetapi tanpa perwakilan karyawan dalam keanggotaan dewan komisaris. Di Indonesia dewan komisaris terpisah dan independen terhadap dewan direksi atau manajemen. Dapat dikatakan bahwa tipe *board system* ini mengarah pada pemisahan formal tanggung jawab komisaris dan direksi. Akhirnya dapat dikatakan bahwa dewan komisaris sebagai puncak sistem pengendalian internal bertanggung jawab atas jalannya fungsi perusahaan (Lukviarman 2004).

Pada umumnya undang-undang perusahaan di seluruh dunia yang menganut model *single-board system* tidak membedakan berbagai gaya (*styles*) dan sebutan (*titles*) direktur. Semua direktur yang telah ditunjuk secara sah oleh para pemegang saham, bertanggung jawab atas *governance* perusahaan. Namun dalam praktik, perlu dibedakan antara direktur yang menempati posisi manajemen dan para komisaris yang mengawasi (*oversight*) mereka. Berkaitan dengan hal itu, *Two-tier board system* memiliki beberapa kelebihan dibandingkan *single-board system* (Alijoyo, 2003):

1. Pengaruh pemegang saham dalam *two-tier board system* dapat dijalankan melalui dewan komisaris sehingga tidak harus mengganggu (*interference*) aktivitas normal manajemen, dan memungkinkan pemegang saham meningkatkan pengaruhnya tanpa harus menunggu terjadinya skandal publik atau ketidaksepakatan publik.
2. Dewan direksi (*top management*) dapat mempertahankan tingkat independensi yang lebih besar pada aras operasional.
3. Dewan direksi, karena pengaruh pemegang saham yang kuat melalui dewan komisaris, harus memperhatikan dengan serius pandangan para pemegang saham.
4. Memungkinkan masuknya lebih banyak komisaris independen, tanpa harus mengganggu kerja normal perusahaan.
5. Tidak mungkin bagi seseorang untuk berperan sebagai presiden komisaris sekaligus presiden direktur sebuah perusahaan, dan kedua posisi dalam kedua dewan tersebut tidak saling mendominasi sebagaimana terjadi

dalam *one-tier system* dimana *chairman* (presiden komisaris) dan *Chief Executive Officer* (CEO) mungkin dijabat oleh satu orang.

6. Karakter yang cenderung tidak sehat pada perusahaan keluarga dapat dicegah bahkan ketika perusahaan dihadapkan pada masalah ketidakmampuan manajerial generasi keluarga yang mengelola.
7. *Two-board system* merupakan mekanisme yang relatif sederhana dalam menjawab kebutuhan publik akan pengendalian seraya tetap mempertahankan independensi manajemen.

Masyarakat Eropa (Uni Eropa) semula mengusulkan agar *two-tier board* ini diterapkan perusahaan-perusahaan di seluruh negara anggota. Namun usul ini ditolak oleh terutama oleh Inggris dan Amerika Serikat serta perusahaan-perusahaan mereka di Eropa. Pemikiran yang kemudian banyak diterima adalah menerapkan *two-tier board system* maupun *single-board system* dengan catatan lebih banyak melibatkan *outside directors* (atau semacam komisaris independen).

## **2) Komposisi Dewan Komisaris di Indonesia (Komisaris Independen)**

Dewan komisaris memegang peranan yang sangat penting dalam perusahaan terutama dalam pelaksanaan *corporate governance*. Dewan Komisaris bertanggung jawab untuk mengawasi kinerja dan kebijakan yang dibuat oleh manajemen/dewan direksi dan memberikan nasihat kepada manajemen. Undang-undang Perseroan Terbatas tahun 1995 sebagai kerangka hukum *corporate governance* saat ini di perusahaan-perusahaan Indonesia menyatakan bahwa

Dewan Komisaris harus melaksanakan tugas untuk kepentingan dan usaha perusahaan dengan tepat dan bertanggung jawab.

Efektivitas dewan komisaris dalam melakukan pengawasan terhadap manajemen ditentukan oleh komposisi, independensi dan ukurannya (John & Senbet 1998 dalam Tressa 2007). Selain itu, komposisi dewan komisaris ditentukan oleh tipe keanggotaan dewan (Lukviarman 2004). Komposisi dewan komisaris sebagaimana dinyatakan dalam *Indonesia's code of good corporate governance* (2006) harus memungkinkan dewan untuk membuat keputusan yang efektif, tepat dan tepat waktu, dan untuk bertindak independen.

Menurut Sulistyanto (2008) komisaris independen merupakan pihak yang bertanggung jawab untuk mendorong diterapkannya prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) untuk menjamin transparansi dan keterbukaan laporan keuangan, keadilan untuk semua stakeholders, dan pengungkapan semua informasi meski ada konflik kepentingan.

FCGI mengusulkan agar dipergunakan definisi yang diterima dalam lingkup internasional yaitu komisaris “ekstern” atau ‘independen’. Kriteria komisaris independen diambil oleh FCGI dari kriteria otoritas Bursa Efek Australia tentang *outside directors*. Kriteria untuk *outside directors* dalam *one-tier system* tersebut telah diterjemahkan menjadi kriteria untuk komisaris independen dalam position paper FCGI kepada NCCG. Kriteria tentang komisaris independen tersebut adalah sebagai berikut:

1. Komisaris independen bukan merupakan anggota manajemen

2. Komisaris independen bukan merupakan pemegang saham mayoritas, atau seorang pejabat dari atau dengan cara lain yang berhubungan secara langsung atau tidak langsung dengan pemegang saham mayoritas dari perusahaan.
3. Komisaris independen dalam kurun waktu tiga tahun terakhir tidak dipekerjakan dalam kapasitasnya sebagai eksekutif oleh perusahaan atau perusahaan lainnya dalam satu kelompok usaha dan tidak pula dipekerjakan dalam kapasitasnya sebagai komisaris setelah tidak lagi menempati posisi seperti itu.
4. Komisaris independen bukan merupakan penasihat profesional perusahaan atau perusahaan lainnya yang satu kelompok dengan perusahaan tersebut.
5. Komisaris independen bukan merupakan seorang pemasok atau pelanggan yang signifikan dan berpengaruh dari perusahaan atau perusahaan lainnya yang satu kelompok, atau dengan cara lain berhubungan secara langsung atau tidak langsung dengan pemasok atau pelanggan tersebut.
6. Komisaris independen tidak memiliki kontraktual dengan perusahaan atau perusahaan lainnya yang satu kelompok selain sebagai komisaris perusahaan tersebut.
7. Komisaris independen harus bebas dari kepentingan dan urusan bisnis apapun atau hubungan lainnya yang dapat atau secara wajar dapat dianggap sebagai campur tangan secara material dengan kemampuannya sebagai seorang komisaris untuk bertindak demi kepentingan yang menguntungkan perusahaan.

Dalam rangka meningkatkan efektivitas dewan komisaris perusahaan di Indonesia, peraturan Bursa Efek Indonesia (BEI) mengharuskan perusahaan publik yang tercatat untuk memiliki komisaris independen tidak kurang dari 30% dari total komisaris. Komisaris Independen diharapkan untuk memantau kepatuhan manajemen dengan hukum dan peraturan yang berlaku dan mereka juga diharapkan untuk memastikan keakuratan informasi yang diberikan oleh manajemen (FCGI 2005). Selanjutnya, BEI memberikan beberapa kriteria untuk komisaris independen:

1. Komisaris independen tidak memiliki hubungan afiliasi dengan pemegang saham dominan (*controlling shareholders*) perusahaan.
2. Komisaris independen tidak memiliki hubungan afiliasi dengan kreditur dan/atau komisaris perusahaan lainnya.
3. Komisaris independen tidak memiliki posisi ganda pada perusahaan lainnya yang terafiliasi dengan perusahaan terkait.
4. Komisaris independen harus mengerti hukum dan peraturan pasar modal.
5. Komisaris independen diusulkan dan diangkat oleh pemegang saham non-pengendali (pemegang saham minoritas) melalui rapat umum pemegang saham.

Tanggung jawab komisaris independen menurut OECD (Siswanto dan Alridge, 2005):

1. Menyusun strategi dan mengarahkan dan menyusun kebijaksanaan operasi bisnis.

2. Memonitor kinerja manajemen senior perusahaan dalam mencapai tujuan strategi perusahaan.
3. Menghasilkan keuntungan yang optimal bagi para pemegang saham.
4. Menjaga keseimbangan kepentingan semua pihak yang terkait dalam perusahaan; misalnya kepentingan pemegang saham mayoritas dan minoritas, kepentingan pemegang saham dan kreditur.
5. Menjaga perusahaan mereka selalu mematuhi undang-undang atau ketentuan hukum yang berlaku termasuk undang-undang perpajakan, ketentuan hukum tentang persaingan yang sehat, lingkungan hidup, kesehatan dan keselamatan kerja.

Menanggapi perihal independensi dewan komisaris sebagai *governing body*, Fama dan Jensen (1983) berpendapat bahwa *outside director* (komisaris independen) lebih efisien dalam memonitor manajemen dan tidak akan melakukan kolusi dengan manajemen. Oleh karena itu, dalam hal pemisahan kepemilikan dan kendali, dewan komisaris independen memfasilitasi fungsi *governance* dewan.

Dalam pengelolaan perusahaan yang sehat, bersih dan bertanggung jawab diperlukan adanya pihak yang berperan sebagai pengawas dan pengendali tindakan dan keputusan manajerial perusahaan. Apalagi pada dasarnya tindakan dan keputusan manajerial menyangkut setiap kepentingan stakeholders. Sistem pengawasan dan pengendalian yang baik akan menghambat manajer untuk menyembunyikan, mengubah, atau menunda informasi yang seharusnya diketahui oleh publik. Untuk itulah dalam prinsip *good corporate governance* ditekankan

pentingnya komisaris independen sebagai pengawas dan pengendali sebuah perusahaan (Sulistyanto, 2008).

### **3) Struktur Kepemilikan (Kepemilikan Terkonsentrasi)**

Struktur kepemilikan saham mencerminkan distribusi kekuasaan dan pengaruh di antara pemegang saham atas kegiatan operasional perusahaan. Struktur kepemilikan dapat dijelaskan dari dua sudut pandang, yaitu pendekatan keagenan dan pendekatan informasi asimetri. Menurut pendekatan keagenan, struktur kepemilikan merupakan suatu mekanisme untuk mengurangi konflik kepentingan antara manajer dengan pemegang saham. Pendekatan ketidakseimbangan informasi memandang mekanisme struktur kepemilikan sebagai suatu cara untuk mengurangi ketidakseimbangan informasi antara *insiders* dan *outsiders* melalui pengungkapan informasi di dalam pasar modal.

#### **a. Kategori Struktur Kepemilikan**

Berdasarkan ciri-ciri khusus mereka pemegang saham perseroan terbatas dapat digolongkan menjadi beberapa kategori (Siswanto dan Aldridge, 2008:74), yaitu:

- 1) Berdasarkan jumlah saham yang dimiliki oleh pemegang saham dapat dibedakan menjadi pemegang saham mayoritas dan pemegang saham minoritas. Tidak sedikit pemegang saham mayoritas memiliki lebih dari 50% dari seluruh saham perusahaan yang diterbitkan.
- 2) Pemegang saham juga dapat dibedakan menjadi pemegang saham orang perorangan dan pemegang saham institusional. Termasuk dalam kategori

pemegang saham institusional antara lain adalah dana pensiun, perusahaan asuransi, bank, dan perusahaan reksadana.

- 3) Berdasarkan kebangsaannya pemegang saham dibedakan menjadi pemegang saham nasional dan pemegang saham asing.

Berle dan Means (1932) dalam Sugiarto (2009:37) mengukur kontrol dengan persentase kepemilikan saham dari individu atau kelompok pemegang saham, yaitu:

- 1) Kontrol Kepemilikan Privat (*Private Ownership Control*)

*Private Ownership Control* merupakan keadaan dimana 80% atau lebih jumlah saham perusahaan publik dimiliki oleh individu atau kelompok bisnis yang berkepentingan terhadap perusahaan.

- 2) Kontrol Mayoritas (*Majority Control*)

Keadaan dimana 50% sampai dengan 80% jumlah saham dalam perusahaan publik dimiliki oleh individu tertentu. Pada keadaan ini individu tersebut memiliki semua kekuatan hukum untuk mengontrol serta memiliki kekuasaan untuk memilih dewan direksi.

- 3) Kontrol Minoritas (*Minority Control*)

Keadaan dimana 20% sampai dengan 50% saham perusahaan publik dimiliki oleh individu yang berkepentingan. Oleh karena itu, *minority control* ini dapat didefinisikan sebagai hak yang dimiliki sekelompok pemegang saham yang belum memungkinkan mereka mendominasi suara.

- 4) Kontrol Manajemen (*Management Control*)

Keadaan dimana kurang dari 20% saham perusahaan publik dimiliki oleh individu atau kelompok bisnis yang berkepentingan dalam perusahaan. Jadi *management control* merujuk kepada kepemilikan yang terdistribusi secara luas sehingga tidak mampu mendominasi perusahaan.

#### 5) *Legal Device*

Suatu keadaan dimana mayoritas kepemilikan saham dimiliki oleh perusahaan besar yang cenderung memiliki juga saham perusahaan lain.

Karakteristik lain struktur kepemilikan adalah konsentrasi kepemilikan yang terbagi dalam dua bentuk struktur kepemilikan, yaitu kepemilikan terkonsentrasi dan kepemilikan menyebar (Nuryaman, 2008).

##### 1) Kepemilikan Menyebar (*dispersed ownership*)

Perusahaan yang kepemilikannya menyebar dikelola oleh manajer profesional dan pemiliknya adalah beberapa investor dengan kepemilikan yang relatif kecil. Dalam konteks perusahaan, prinsipal adalah pemilik perusahaan (pemegang saham) dan agennya adalah tim manajemen dimana tim manajemen ini diberi kewenangan untuk mengambil keputusan yang terkait dengan operasi dan strategi perusahaan (Sugiarto, 2009:55).

Kepemilikan seperti ini menyebabkan tidak ada pemegang saham mayoritas yang bisa mengintervensi wewenang manajer perusahaan sehingga semua pemegang saham mempunyai hak suara yang relatif sama satu dengan yang lain (Sulistyanto, 2008:136). Pada kepemilikan menyebar ini akan timbul masalah keagenan antara pemilik dan pengelola (manajer). Menurut Prasetyantoko

(2008:60) masalah keagenan seperti ini dapat ditekan melalui beberapa cara berikut:

- (a). Sistem penggajian (*remuneration system*): diyakini, sistem penggajian yang baik akan menekan sifat oportunistis para pengelola perusahaan. Akhir-akhir ini, diterapkan pembelian kepemilikan perusahaan dalam persentase tertentu kepada para pengelola perusahaan sebagai salah satu cara menekan masalah keagenan ini. Sistem ini dikenal sebagai *stock option*.
- (b). Sistem pengawasan internal: untuk mengawasi jalannya perusahaan yang dilakukan oleh pihak lain, para pemilik modal menugaskan dewan pengawas yang membawahi para pengelola perusahaan di bawah CEO (*chief executive officer*).
- (c). Sistem pengawasan eksternal (pasar): pengawasan melalui sistem pasar bisa terjadi karena dua sebab. Pertama, kontrol yang dilakukan oleh para investor itu sendiri dengan cara jual beli kepemilikan (saham). Kedua, kontrol bisa terjadi lewat mekanisme akuisisi yang dilakukan atas alasan keterpaksaan karena kinerja perusahaan cenderung buruk dan sulit diselamatkan sehingga mengundang perusahaan lain untuk mengakuisisi.
- (d). Pasar eksekutif: mekanisme pengawasan dan kontrol terhadap kinerja para eksekutif dalam menjalankan perusahaan terjadi akibat ketatnya persaingan pasar para eksekutif. Semakin tinggi penawaran tenaga kerja di tingkat eksekutif tersebut, akan semakin kuat tekanan bagi para pengelola perusahaan untuk membuktikan kinerjanya.

(e). Konsentrasi kepemilikan: dalam berbagai studi ditunjukkan bahwa konsentrasi kepemilikan yang tinggi diyakini akan meningkatkan kontrol terhadap manajer. Pengawasan dan kontrol melalui konsentrasi kepemilikan dinilai paling baik untuk mengendalikan sifat oportunistis para pengelola perusahaan.

## 2) Kepemilikan Terkonsentrasi (*concentrated ownership*)

Menurut Nuryaman (2008), kepemilikan terkonsentrasi adalah suatu kondisi dimana sebagian besar saham dimiliki oleh sebagian kecil individu/kelompok, sehingga individu atau kelompok tersebut memiliki jumlah saham relatif dominan dibandingkan dengan pemegang saham lainnya. Holderness and Sheehan (1988) dalam Tressa (2007) mendefinisikan kepemilikan terkonsentrasi (*concentrated ownership*) sebagai individu atau institusi yang memiliki 50% saham atau lebih (*majority*)

### **b. Hak Pemegang Saham**

Pemegang saham mempunyai hak-hak dasar. Untuk perusahaan publik di kebanyakan negara hak dasar tersebut dimuat di dalam undang-undang tentang perseroan dan ketentuan yang dikeluarkan oleh badan pengawas pasar modal setempat sehingga wajib dipatuhi oleh perusahaan dan semua pemegang sahamnya.

Menurut Siswanto dan Aldridge (2008:76) hak-hak dasar pemegang saham dapat dikategorikan menjadi dua kelompok, yaitu:

1) Hak-hak yang berkaitan dengan kepemilikan saham

Karena memiliki saham, secara prorata pemegang saham ikut memiliki perusahaan. Hak-hak pemegang saham yang berkaitan dengan kepemilikan perusahaan terdiri dari:

- a). Mendapat jaminan saham mereka didaftarkan di lembaga pemerintah yang berwenang (di Indonesia lembaga pemerintah itu adalah Departemen Kehakiman).
  - b). Hak memindah tangankan saham perusahaan yang ikut mereka miliki.
  - c). Memperoleh laporan tentang kondisi dan perkembangan usaha dan keuangan perusahaan secara regular, akurat, diungkapkan secara transparan dan tepat waktu.
  - d). Menghadiri rapat umum pemegang saham dan secara prorata ikut melakukan pemungutan suara (*voting*).
  - e). Secara prorata mendapat pembagian keuntungan perusahaan dalam bentuk dividen.
  - f). Ikut memilih dan mengganti anggota Dewan Komisaris dan Direksi.
- 2) Hak yang diciptakan sebagai konsekuensi pemisahan fungsi pemegang saham dan Dewan Pengurus (*Board of Directors*) serta manajemen puncak. Hak yang kedua ini lazim disebut hak ikut mengambil keputusan penting. Untuk pengambilan keputusan penting yang menyangkut kelangsungan hidup perusahaan, para pemegang saham mempunyai hak mengajukan pendapat dan ikut memutuskannya. Termasuk dalam keputusan penting tersebut adalah:
- a). Perubahan isi dokumen penting seperti akta pendirian, anggaran dasar dan anggaran rumah tangga perusahaan.

- b). Perubahan hak para pemegang saham.
- c). Merjer dan akuisisi.
- d). Penjualan atau pembelian harta perusahaan yang tinggi nilainya.

Hak para pemegang saham ikut mengajukan pendapat dalam memutuskan hal-hal penting diatas dapat mengurangi kemungkinan manajemen puncak perusahaan menyalahgunakan wewenang mereka dalam mengelola perusahaan untuk kepentingan diri sendiri.

## **B. Penelitian Relevan**

Tressa (2007) melakukan penelitian mengenai pengaruh mekanisme *internal governance* terhadap kinerja bank yang *listing* di *Jakarta Stock Exchange* dengan periode penelitian tahun 2001 sampai tahun 2005. Untuk kinerja perusahaan, ia menggunakan tiga pengukuran, yaitu *Return on Asset (ROA)*, *Return on Equity (ROE)*, dan rasio biaya operasional terhadap pendapatan operasional (BOPO) sebagai ukuran efisiensi. Dari penelitiannya, ia berhasil menemukan adanya pengaruh signifikan positif antara proporsi *outside directors* (komisaris independen) dengan kinerja perusahaan perbankan di Indonesia.

Manawaduge, Zoysa, dan Rudkin (2008) melakukan penelitian mengenai implikasi kinerja dari struktur kepemilikan dan konsentrasi kepemilikan pada perusahaan-perusahaan di Sri Lanka. Mereka mengambil sampel dari 45 perusahaan yang *listing* di *Colombo Stock Exchange (CSE)*. Untuk kinerja perusahaan, mereka menggunakan tiga pengukuran, yaitu *Return on Asset (ROA)*, *Tobin's Q*, dan *market to book value ratio (MBR)*. Dari penelitiannya, mereka

berhasil menemukan bahwa konsentrasi kepemilikan berpengaruh terhadap kinerja perusahaan. Artinya, semakin tinggi konsentrasi kepemilikan, maka kinerja perusahaan dari perusahaan juga akan semakin baik, dan sebaliknya.

Sarini (2007) meneliti mengenai pengaruh struktur kepemilikan dan *good corporate governance* terhadap kinerja keuangan perusahaan. Ia mengambil sampel perusahaan yang konstan tergabung dalam Indeks LQ 45 pada periode 2003 sampai 2005. Struktur kepemilikan menggunakan pengukuran variabel *dummy*, 1 untuk kepemilikan terkonsentrasi dan 0 untuk kepemilikan tersebar, sedangkan kinerja keuangan perusahaan menggunakan pengukuran Tobin's Q dan *return on investment* (ROI). Ia berhasil membuktikan bahwa struktur kepemilikan berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan, baik dengan pengukuran Tobin's Q maupun ROI.

Desiva (2010) juga menemukan bahwa struktur kepemilikan berpengaruh signifikan terhadap kinerja perusahaan yang berarti bahwa semakin besar persentase kepemilikan saham oleh satu pihak dominan (kepemilikan terkonsentrasi) maka semakin tinggi kinerja perusahaan.

### **C. Pengembangan Hipotesis**

#### **1. Hubungan komposisi Komisaris Independen dengan Kinerja Perusahaan**

Dewan komisaris memegang peranan yang sangat penting dalam perusahaan terutama dalam pelaksanaan *corporate governance*. Dewan Komisaris bertanggung jawab untuk mengawasi kinerja dan kebijakan yang dibuat oleh

manajemen/dewan direksi dan memberikan nasihat kepada manajemen. Menurut Sulistyanto (2008), komisaris independen mendorong diterapkannya prinsip *Good Corporate Governance* untuk menjamin transparansi dan keterbukaan laporan keuangan, keadilan untuk semua stakeholders, dan pengungkapan semua informasi. Komisaris independen akan membantu untuk memantau dan mengontrol perilaku oportunistik manajemen.

Hasil penelitian Tressa (2007) menjelaskan bahwa proporsi dewan komisaris independen berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja perusahaan perbankan di Indonesia.

Menanggapi persoalan independensi dewan komisaris di atas, peneliti menduga bahwa perbaikan independensi dewan komisaris akan berdampak pula pada perbaikan kinerja perusahaan atau dengan kata lain komisaris independen berpengaruh terhadap kinerja perusahaan. Hal ini menjelaskan bahwa komisaris independen lebih efisien dalam memonitor manajemen dan tidak berkolusi dengan manajemen. Dalam kasus di Indonesia, sejak perusahaan-perusahaan perbankan diminta untuk menerapkan praktik *Good Corporate Governance* dan dibutuhkan oleh BEI dengan tidak memiliki komisaris independen kurang dari 30% guna memonitor manajemen.

## **2. Hubungan Kepemilikan Terkonsentrasi dengan Kinerja Perusahaan**

Variasi *Corporate governance* tergantung pada struktur kepemilikan perusahaan. Struktur Kepemilikan mengacu pada konfigurasi kepemilikan individu atau organisasi dalam suatu perusahaan. Setiap perusahaan mempunyai

struktur kepemilikan yang berbeda dimana struktur kepemilikan ini dapat dikategorikan menjadi beberapa kelompok berdasarkan karakteristik tertentu. Salah satu karakteristik struktur kepemilikan ini adalah konsentrasi kepemilikan. Struktur kepemilikan berdasarkan karakteristik ini dapat dibedakan menjadi dua, yaitu kepemilikan menyebar dan kepemilikan terkonsentrasi (Nuryaman, 2008).

Menurut Nuryaman (2008), adanya konsentrasi kepemilikan yang berbeda ini akan mempunyai pengaruh yang berbeda pula terhadap kinerja perusahaan. Perusahaan yang konsentrasi kepemilikannya tinggi mempunyai kinerja yang lebih baik daripada perusahaan yang kepemilikannya menyebar. Hal ini disebabkan kepemilikan yang semakin terkonsentrasi akan ada satu pihak dominan yang bisa mengintervensi manajemen sehingga manajemen tidak memiliki keleluasaan untuk melakukan berbagai tindakan yang menguntungkan dirinya sendiri, yaitu dengan melakukan manajemen laba dalam menjalankan perusahaan. Dengan demikian, manajemen akan termotivasi untuk bertindak sesuai dengan kepentingan pemilik yang menginginkan kinerja perusahaan mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.

Salah satu mekanisme dalam mengendalikan masalah keagenan dengan memusatkan kepemilikan. Kepemilikan terkonsentrasi sangat membantu dalam mempersiapkan motivasi yang cukup dan pengaruhnya pada orang-orang yang masuk dalam kontrol operasi harian perusahaan. Kepemilikan saham yang terkonsentrasi menunjukkan rendahnya biaya keagenan, karena konflik yang terjadi antar pemilik menjadi semakin kecil, sehingga dapat meningkatkan

produktivitas dan kinerja perusahaan dengan memberikan dorongan yang lebih besar bagi pemegang saham untuk mengawasi manajemen.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa kepemilikan saham yang semakin terkonsentrasi mampu mengurangi kemungkinan manajemen menyalahgunakan wewenang mereka dalam mengelola perusahaan untuk kepentingan diri sendiri dan meningkatkan kontrol terhadap manajemen dibandingkan dengan kepemilikan saham yang menyebar.

#### **D. Kerangka Konseptual**

Kinerja perusahaan merupakan prestasi yang ditunjukkan oleh manajemen selama periode waktu tertentu. Kinerja perusahaan ini dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, yaitu proporsi/perbandingan dewan komisaris *independent* terhadap jumlah total dewan komisaris dan kepemilikan Terkonsentrasi.

Komisaris independen mendorong diterapkannya prinsip *good corporate governance*. Dalam pengelolaan perusahaan yang sehat, bersih dan bertanggung jawab diperlukan adanya pihak yang berperan sebagai pengawas dan pengendali tindakan dan keputusan direksi/ manajer perusahaan. Dalam hal ini komposisi komisaris independen menjadi hal yang penting mengingat komisaris independen lebih efisien dalam memonitor manajemen dan tidak akan berkolusi dengan manajemen sehingga berpengaruh baik terhadap kinerja perusahaan.

Struktur kepemilikan dapat dibedakan menjadi beberapa karakteristik, salah satunya adalah konsentrasi kepemilikan. Struktur kepemilikan berdasarkan konsentrasi kepemilikan ini dapat dibedakan menjadi kepemilikan menyebar dan

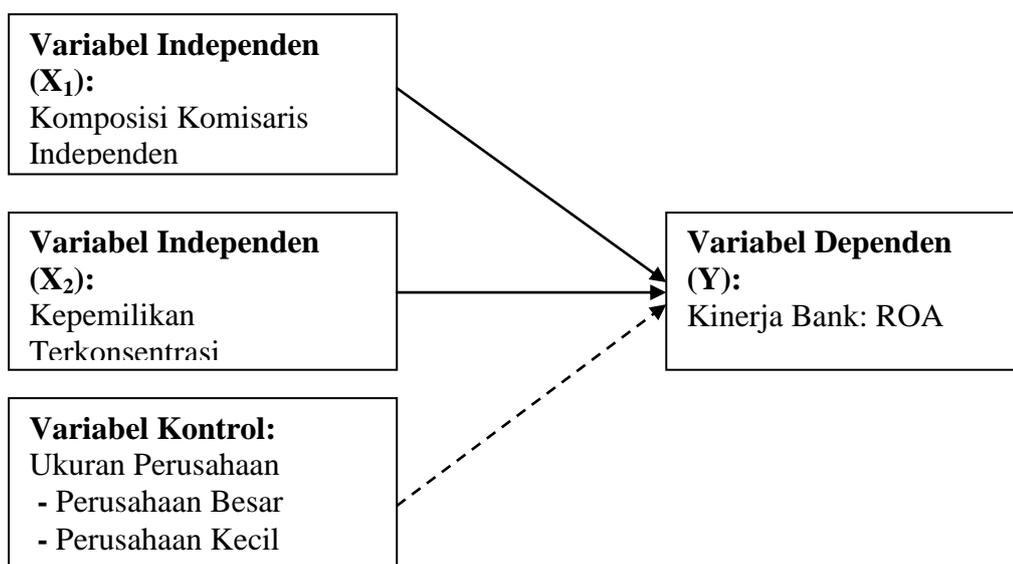
kepemilikan terkonsentrasi. Dalam hal kaitannya dengan kinerja perusahaan, kepemilikan terkonsentrasi dinilai lebih baik untuk menaikkan kinerja perusahaan, karena kepemilikan terkonsentrasi ada pihak yang memonitor manajemen untuk bekerja sesuai dengan kepentingan pemilik yaitu peningkatan kinerja perusahaan.

Pada kepemilikan saham menyebar kemungkinan terjadinya manajemen laba lebih besar, karena manajemen lebih mempunyai kendali terhadap perusahaan sehingga melakukan berbagai cara agar kinerja perusahaan sesuai dengan harapan para pemegang saham. Sebaliknya dengan adanya, kepemilikan terkonsentrasi pemegang saham mayoritas dapat menekan perilaku oportunistik dari manajernya sehingga kinerja perusahaan yang dilaporkan menunjukkan keadaan yang sebenarnya pada saat itu.

Dari uraian di atas, dapat digambarkan kerangka konseptual sebagai berikut:

**Gambar. 1**

**Kerangka Konseptual**



## **E. Hipotesis Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah dapat dibuat hipotesis sebagai berikut:

- H1 : komposisi komisaris independen pada bank secara umum berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja bank (ROA).
- H1a: komposisi komisaris independen pada bank besar berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja bank (ROA).
- H1b: komposisi komisaris independen pada bank kecil berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja bank (ROA).
- H2 : struktur kepemilikan yang terkonsentrasi pada bank secara umum menyebabkan probabilitas atau kecenderungan kinerja yang tinggi.
- H2a: struktur kepemilikan yang terkonsentrasi pada bank besar menyebabkan probabilitas atau kecenderungan kinerja yang tinggi.
- H2b: struktur kepemilikan yang terkonsentrasi pada bank kecil menyebabkan probabilitas atau kecenderungan kinerja yang tinggi.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang diuraikan pada bab sebelumnya, maka penulis mengambil kesimpulan:

1. Komposisi komisaris independen berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia yang berarti bahwa semakin besar anggota independen dalam struktur dewan komisaris, maka akan semakin tinggi kinerja perusahaan.
2. Struktur kepemilikan terkonsentrasi menyebabkan kinerja perusahaan menjadi lebih tinggi.
3. Pada perusahaan perbankan yang berukuran besar maupun kecil, komposisi komisaris independen sama-sama berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI. Namun berbeda untuk variabel kepemilikan terkonsentrasi dimana bank besar kepemilikan terkonsentrasi berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja bank. Sementara pada bank kecil tidak ditemukan adanya pengaruh yang signifikan kepemilikan terkonsentrasi terhadap kinerja bank yang terdaftar di BEI. Hasil ini mengindikasikan bahwa perusahaan dengan ukuran besar mempunyai kemungkinan untuk mencapai kinerja keuangan yang baik oleh karena perusahaan besar lebih mempunyai

sumber daya dan akses perolehan sumber daya sehingga dapat menjamin kelancaran proses operasional perusahaan.

## **B. Keterbatasan Penelitian**

Seperti kebanyakan penelitian yang lainnya, penelitian ini memiliki keterbatasan yaitu:

1. Pada variabel kepemilikan terkonsentrasi tidak diidentifikasi pihak dominan yang memegang saham terbesar, seperti konsentrasi kepemilikan institusional, konsentrasi kepemilikan manajerial, konsentrasi kepemilikan pemerintah, dan konsentrasi kepemilikan privat.
2. Jumlah sampel atau data observasi yang digunakan masih tergolong kecil yaitu perusahaan perbankan saja sehingga tidak mewakili populasi perusahaan yang ada di Bursa Efek Indonesia.
3. Masih adanya sejumlah variabel lain yang belum digunakan dan memiliki kontribusi yang besar terhadap kinerja perusahaan.
4. Rentang waktu yang digunakan dalam penelitian ini masih terlalu singkat jika dibandingkan dengan penelitian-penelitian sebelumnya yang meneliti dengan rentang waktu di atas 5 tahun.

## **C. Saran**

Adapun saran-saran yang dapat penulis berikan sehubungan dengan keterbatasan yang terdapat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi para investor maupun calon investor yang membutuhkan informasi dari laporan keuangan perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia sebaiknya memperhatikan dengan baik laporan keuangan serta mempertimbangkan komposisi komisaris independen dalam struktur dewan komisaris dan kepemilikan saham yang terkonsentrasi, karena variabel ini sangat berpengaruh terhadap kinerja bank yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
2. Bagi perusahaan hendaknya meningkatkan proporsi dewan komisaris independen dalam struktur dewan komisaris dan meningkatkan struktur kepemilikan perusahaan, karena komisaris independen dan struktur kepemilikan yang terkonsentrasi bisa memberikan kesempatan bagi pemegang saham untuk memonitor manajemen sehingga kinerja perusahaan dapat meningkat.
3. Bagi penelitian berikutnya:
  - a. Memasukan komponen *corporate governance* lainnya yang tidak terbatas pada komposisi komisaris independen dan struktur kepemilikan.
  - b. Memperpanjang periode penelitian sehingga dapat diperoleh jumlah sampel yang lebih banyak dan hasil penelitian yang lebih baik secara statistik.
  - c. Selain itu untuk lebih memperdalam informasi mengenai pengaruh komposisi dewan komisaris independen dan struktur kepemilikan yang terkonsentrasi terhadap kinerja perlu dilakukan suatu penelitian yang

lebih komprehensif lagi dari segi jumlah maupun cakupan sampel untuk melihat apakah hasil penelitian akan tetap konsisten ataukah menunjukkan hasil yang berbeda, misalnya dengan menggunakan sampel selain bank.

## DAFTAR PUSTAKA

- Alijoyo F. Antonius, dkk. 2003. *Corporate Governance: Tantangan dan Kesempatan bagi Komunitas Bisnis Indonesia*. Jakarta: PT Prenhallindo.
- Ariesta, Aulya. 2009. *Pengaruh Lingkungan Eksternal Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan dengan Perencanaan Strategik Sebagai Variabel Intervening*. Skripsi. Universitas Andalas.
- Asian Development Bank/A.D.B. 2000, 'Corporate Governance and Finance in East Asia: a Study of Indonesia, Republic of Korea, Malaysia, Philippines, and Thailand', *Consolidated Report Vol. 1*, The Asian Development, Manila.
- Agrawal, A. & C.R. Knoeber 1996, 'Firm Performance and Mechanisms to Control Agency Problems Between Managers and Shareholders', *Journal of Financial & Quantitative Analysis*, pp.377-397.
- Bank Indonesia Regulation Number 8/4/PBI/2006, Indonesia.
- Basel Committee on Banking Supervision 2005, *Enhancing Corporate Governance for Banking Organizations*, Bank for International Settlements.
- Baysinger, B. D. & Butler, H. N. (1985). Corporate Governance and The Board of Directors: Performance Effects of Changes in Board Composition. *Journal of Law, Economics and Organization* 1: 101–124.
- Blair, M.M. 1995, *Ownership and Control: Rethinking Corporate Governance for the Twenty-first Century*, The Booking Institution, New York.
- Brennan, N. & McDermott, M. 2004, 'Alternative Perspectives on Independence of Directors', *Blackwell Publishing*, USA.
- Cadbury, A. 1999, 'What Are The Trends in Corporate Governance? What Do We Know?', *Journal of Financial Intermediation*, vol.9, no.1.
- Desiva, Minda. 2010. *Pengaruh Struktur Kepemilikan Terhadap Kinerja Perusahaan Dengan Manajemen Laba Sebagai Variabel Intervening*. Skripsi. Universitas Negeri Padang.
- Grob, Kerstin. 2007. *Equity Ownership and Performance*. Heidelberg: Physica-Verlag.
- IAI. 2009. *Standar Akuntansi Keuangan Per 1 Juli 2009*. Jakarta: Salemba Empat.

- Jensen, M.C. & Meckling, W.H. 1976, 'Theory of The Firm: Management Behavior, Agency Costs and Ownership Structure', <http://www.ssrn.com>
- Jensen, M.C. 2000, *A theory of the firm: Governance, Residual Claims, and Organizational Forms*, Harvard University Press, Cambridge.
- Jensen, M.C. & Fama, E. (1983), *Separation of Ownership and Control*, <http://www.ssrn.com>
- Kuncoro, Mudrajad. 2003. *Metode Riset untuk Bisnis dan Ekonomi (Bagaimana Meneliti dan Menulis Tesis)*. Jakarta: Erlangga
- Keat, P.G. & Young, P.K.Y. 2003, *Managerial Economics: Economic Tools for Today's Decision Makers (Fourth Edition)*, Prentice Hall, New Jersey.
- Lukviarman, N. 2004, 'Ownership Structure and Firm Performance: The Case of Indonesia', *DBA Thesis*, Graduate School of Business, Curtin University of Technology, Perth.
- Lukman Syamsuddin. 2004. *Manajemen Keuangan Perusahaan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Macey, R.J. 1998, 'Measuring The Effectiveness of Different Corporate Governance Systems: Toward a More Scientific Approach', *Journal of Applied Corporate Finance*, vol.10, no.4, pp.16-25.
- Manawaduge, Athula, A. D. Zoysa, & K. Rudkin. 2008. *Performance Implication of Ownership Structure and Ownership Concentration: Evidence From Sri Lankan Firms*.
- Mariewaty, Dian & Setyani, A. Yuli. 2005. Analisis Rasio Keuangan Terhadap Perubahan Kinerja pada Perusahaan di Industri Food and Beverages yang Terdaftar di BEJ. Simposium Nasional Akuntansi VIII.
- Middlemist, R.D. 2004. *Corporate Governance*. Colorado State University.
- Mulyadi. 1997. *Akuntansi Manajemen: Konsep, Manfaat, dan Rekayasa*. Yogyakarta: Bagian Penerbit Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN.
- Nuryaman. 2008. *Pengaruh Konsentrasi Kepemilikan, Ukuran Perusahaan, dan Mekanisme Corporate Governance terhadap Manajemen Laba*. Simposium Nasional Akuntansi XI.
- Prasetyantoko. 2008. *Corporate Governance: Pendekatan Institusional*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Umum.

- Puspita, Lisa. 2006. *Board Governance Dan Kinerja Perusahaan*. Skripsi. Universitas Andalas.
- Rahman, R.A. & Haniffa, R.M. 2003. 'Internal Governance Mechanisms and Performance of Malaysian Listed Companies', *Journal*, presented at ANZAM 2003 Conference, Perth, Australia 2-4 December 2003.
- Sanjai Bhagat & Bernard Black. 1999. The Non-Correlation Between Board Independence and Long Term Firm Performace. *Journal of Corporate law*.
- Sarini M. Nur. 2007. *Pengaruh Struktur Kepemilikan dan Good Corporate Governance terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan Go Public di Bursa Efek Indonesia*. Skripsi. Universitas Bung Hatta.
- Sedarmayanti. 2007. *Good Governance dan Good Corporate Governance*. Bandung: Mandar Maju.
- Siswanto Sutojo dan Alridge, E.Jhon. 2005. *Tata Kelola Korporasi yang Sehat*. Jakarta: PT.Damar Mulia Pustaka.
- Shleifer, A. & Vishny, R.W. 1997. 'Agency problems and Dividend Policies Around the World'. <http://www.ssrn.com>
- Sulistiyanto, Sri. 2008. *Manajemen Laba: Teori dan Model Empiris*. Jakarta: Grasindo.
- Sugiarto. 2009. *Struktur Modal, Struktur Kepemilikan Perusahaan, Permasalahan Keagenan dan Informasi Asimetri*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Suwardjono. 2005. *Teori Akuntansi: Perekayasaan Pelaporan Keuangan*. Yogyakarta: BPF.
- Tressa, Meghi. 2007. The Internal Governance Mechanism and Performance of Indonesian banks Listed in Jakarta Stock Exchange. Skripsi. Universitas Andalas.
- UFJI & FCGI 2005, *Corporate Governance of Banks in Indonesia*, PT UFJ Institute Indonesia – Forum for Corporate Governance in Indonesia.
- Umar, Husein. 2003. *Evaluasi Kinerja Perusahaan: Teknik Evaluasi Bisnis dan Kinerja Perusahaan secara Komprehensif, Kuantitatif, dan Modern*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Yermack, D. 1996, 'Higher Market Valuation of Companies With Small Board of Directors', *Journal of Financial Economics* 40, pp.185-211.

Zarkasyi, Moh. Wahyudin. 2008. *Good Corporate Governance: Pada Badan Usaha Manufaktur, Perbankan, dan Jasa Keuangan Lainnya*. Bandung: Alfabeta.

<http://www.jsx.co.id>

<http://www.idx.co.id>

<http://www.google.com>